

Evaluasi Pemekaran Desa Berdasarkan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka

Evaluation of Village Expansion Based on Community Satisfaction Level in Lowolabo Village and Aebubu Village, Paga District, Sikka Regency

George Christofer Seko¹, Agung Witjaksono², Maria Christina Enderwati³

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, Kampus 1 ITN Malang, Jalan Bendungan Sigura-Gura No.2, Kota Malang 65145, Indonesia,

email: chikosino381@gmail.com

Abstract

The implications of the policy on regional autonomy provide opportunities for regions in Indonesia to expand their regions. Regional expansion does not only occur at the provincial level but at the district, sub-district, and even village levels. The purpose of regional expansion is to accelerate development and equitable development in a region. In addition, the number of expansion areas in Indonesia continues to increase every year, especially the addition of new villages. The increase in the number of villages, which is expected to increase equitable development, has not been able to realize the objectives of village expansion, so that there are inequalities between one village and another. In this study, the analytical method used is evaluative by collecting information about an object under study to measure the success rate of village expansion. The results of this study can serve as a reference in determining the direction of development after village expansion..

Keywords : *Regional expansion, Infrastructure Development, Satisfaction level.*

Abstrak

Implikasi dari kebijakan mengenai otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi pada tingkat wilayah provinsi melainkan pada tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat desa. Tujuan adanya pemekaran wilayah ialah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan Pembangunan di suatu daerah. Disamping itu, jumlah daerah pemekaran di Indonesia terus bertambah tiap tahunnya khususnya penambahan jumlah desa baru. Penambahan jumlah desa yang diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan masih belum mampu mewujudkan tujuan dari pemekaran desa, sehingga terdapat ketimpangan antara desa yang satu dengan desa lainnya. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah evaluatif dengan cara mengumpulkan informasi mengenai suatu objek yang diteliti untuk mengukur tingkat keberhasilan pemekaran desa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini mampu menjadi acuan dalam menentukan arah Pembangunan pasca adanya pemekaran desa.

Kata kunci : Pemekaran wilayah, Pembangunan infrastruktur, Tingkat kepuasan.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan mengenai otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi memberikan peluang bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan pemekaran wilayah (Subagyo, 2013). Menurut Arif dalam (Ratnawati, 2006) Pemekaran daerah merupakan proses pembagian wilayah menjadi satu atau lebih, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat Pembangunan (Syahrir et al., 2022). Dengan kata lain, pemekaran merupakan cara strategis pemerintah dalam mewujudkan kualitas, pelayanan, pemberdayaan dan Pembangunan bagi Masyarakat yang maju, mandiri, Sejahtera, adil dan Makmur (Nikasari R, 2017). Dalam penelitiannya, Rachim (2013) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia yakni Peningkatan kualitas pelayanan publik artinya pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah dirasa akan lebih efektif dan efisien dibandingkan daerah induk, serta Percepatan pertumbuhan ekonomi yang mana pemekaran daerah dianggap mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal (Hakim et al., 2016). Oleh karenanya, banyak daerah saling berlomba melakukan pemekaran daerah (Athahirah & Lambelanova, 2019).

Pemekaran daerah atau wilayah bukan hanya terjadi pada tingkat daerah provinsi, melainkan juga pada tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan wilayah desa sebagai strategi dalam mewujudkan otonomi daerah (Telung et al., 2019). Menurut Albert (1995), Pemekaran desa merupakan suatu proses pembagian satu atau lebih wilayah yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan dan pemerataan Pembangunan di suatu daerah baru (Sundari et al., 2020). Dengan Mekarnya sebuah desa maka jumlah warga Masyarakat dalam satu desa semakin berkurang sehingga segala sesuatu urusan dalam desa baik itu urusan pemerintahan, Pembangunan maupun kemasyarakatan bisa berjalan lebih optimal (Studi et al., 2023). Disamping itu, salah satu faktor pendorong adanya pembentukan desa dikarenakan wilayah desa yang terlalu luas dan juga rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh. Alasan lainnya adalah jarak yang terlalu

jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk mendapatkan jasa pelayanan pemerintah serta birokrasi dilihat sebagai lambannya peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Akhirnya Solusi yang diberikan dengan melakukan pembentukan desa baru, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang nantinya berdampak terhadap kesejahteraan Masyarakat (Jati, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, terdapat peningkatan jumlah desa di Indonesia yakni dari 73.930 desa pada tahun 2019 menjadi 89.101 desa pada tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan jumlah desa yakni dari desa defenitif dan desa pemekaran yang terus bertambah tiap tahunnya. Pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antar desa. Namun kenyataannya, tidak semua desa mengalami kemajuan yang signifikan Dimana pasca adanya pemekaran desa, masih terdapat desa pemekaran yang tertinggal dalam hal pelayanan publik, Pembangunan desa, dan kesejahteraan Masyarakat yang merupakan tujuan dari pemekaran itu sendiri.

Desa Lowolabo dan Desa Aebubu merupakan desa pemekaran dari Desa Induk Paga. Kedua desa tersebut resmi mekar sejak ditetapkannya SK Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pembentukan 34 Desa Persiapan yang sebelumnya sudah melalui proses panjang hingga tahap akhir pembentukan desa (Florespedia, 2022). Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan tahun 2023, terdapat ketimpangan antar Desa Lowolabo dan Desa Aebubu. Ketimpangan yang dimaksud antara lain minimnya infrastruktur, kesulitan akses menuju fasilitas dasar, dan kondisi infrastruktur yang tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai **“Evaluasi Pemekaran Desa Berdasarkan Tingkat Kepuasan Masyarakat di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka”** untuk menilai keberhasilan dari kebijakan pemekaran desa dengan melihat Tingkat kepuasan

Masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

“Bagaimana Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pemekaran desa yang ada di Desa Aebubu dan Desa Lowolabo, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka?”

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat kepuasan Masyarakat pasca pemekaran desa yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka. Aspek yang dinilai disini ialah pembangunan infrastruktur yang ada di kedua Desa. Adapun terdapat sasaran untuk mencapai tujuan, yakni:

- 1) Mengidentifikasi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu.
- 2) Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitan ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan metode deskriptif kualitatif. Danim (2000), berpendapat bahwa penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan pembelajaran (Kantun, 2017). Sehingga jika dalam konteks pemekaran desa, penelitian evaluatif digunakan untuk menilai dan mengukur keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan pemekaran desa berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yakni survey primer dan survey sekunder. Pengumpulan data menggunakan survey primer diperoleh melalui kegiatan wawancara berupa pertanyaan langsung dengan subjek penelitian, observasi atau pengamatan langsung terhadap infrastruktur yang ada di kedua desa, serta penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan survey sekunder didapatkan dari literatur atau sumber lain seperti dokumen, buku jurnal, atau bacaan lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari hasil kajian literatur berupa profil desa, kecamatan dalam angka (KDA), dan dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai

kelengkapan data. Adapun untuk pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada **tabel 1** sebagai berikut.

Tabel 1 Kuesioner Kepuasan Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur

No	Pertanyaan/Pernyataan	Nilai Kepuasan			
		1	2	3	4
A Jaringan Jalan					
1	Seberapa puas Anda dengan kondisi jalan yang ada di desa				
2	Bagaimana kemudahan menggunakan jalan untuk aktivitas sehari-hari				
3	Apakah Anda merasa puas dengan keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan jalan				
B Jaringan Listrik					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan pasokan listrik yang ada di desa				
2	Bagaimana kondisi jaringan listrik yang ada di desa				
3	Apakah Anda merasa puas terkait penanganan permasalahan listrik (pemadaman listrik) yang ada di desa				
C Jaringan Telekomunikasi					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi (telepon dan internet) yang ada di desa				
2	Bagaimana kualitas sinyal yang dihasilkan oleh jaringan telekomunikasi tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas terkait kemudahan dalam mengakses jaringan telekomunikasi tersebut				
D Jaringan Sampah					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan tempat sampah yang ada di desa				
2	Bagaimana kondisi pengelolaan sampah tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas terkait penanganan permasalahan sampah yang ada di desa				
E Jaringan Limbah					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan pengelolaan jaringan limbah (limbah rumah tangga)				
2	Bagaimana kondisi pengelolaan jaringan limbah tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas terkait pengelolaan limbah dalam mengurangi masalah di lingkungan Anda				
F Jaringan Air Bersih					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan air bersih yang ada di desa				
2	Bagaimana kemudahan dalam memperoleh air bersih tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas dengan kualitas air bersih yang dihasilkan				

No	Pertanyaan/Pernyataan	Nilai Kepuasan			
		1	2	3	4
G Jaringan Drainase					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan jaringan drainase (saluran air) yang ada di desa				
2	Bagaimana kondisi jaringan drainase tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas dengan keberfungsian jaringan drainase tersebut				
H Jaringan Irigasi					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian yang ada di desa				
2	Bagaimana pendapat anda dengan kondisi jaringan irigasi tersebut				
3	Apakah Anda merasa puas terkait keberfungsian irigasi tersebut				
I Fasilitas Pendidikan					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada di desa				
2	Bagaimana kemudahan menjangkau fasilitas pendidikan dari tempat tinggal Anda				
3	Apakah Anda merasa puas dengan kondisi bangunan fasilitas pendidikan yang tersedia				
J Fasilitas Kesehatan					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di desa				
2	Bagaimana kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan dari tempat tinggal Anda				
3	Apakah Anda merasa puas dengan kondisi bangunan fasilitas kesehatan yang tersedia				
K Fasilitas Peribadatan					
1	Seberapa puas Anda dengan ketersediaan fasilitas peribadatan yang ada di desa				
2	Bagaimana kemudahan menjangkau fasilitas peribadatan dari tempat tinggal Anda				
3	Apakah anda merasa puas dengan kondisi bangunan fasilitas peribadatan yang tersedia				
L Fasilitas Perkantoran					
1	Seberapa puas Anda dengan kondisi bangunan kantor desa				
2	Bagaimana kemudahan dalam menjangkau kantor desa dari tempat tinggal anda				
3	Apakah Anda merasa puas terkait kenyamanan fasilitas yang ada di kantor desa				

Sumber. Hasil kajian penelitian, 2024

Metode Analisis Data

Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, peneliti menggunakan kuesioner sebagai metode dalam mengumpulkan data. Namun, data kuesioner memiliki kekurangan karena dapat menghasilkan informasi yang tidak valid. Perlu adanya suatu metode yang mampu menghasilkan data yang akurat dan teruji sehingga peneliti memilih menggunakan skala likert (Santika et al., 2023). Menurut Sugiono (2017), skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, pendapat dan sikap seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial (Rumambi, 2022). Berdasarkan jenisnya, skala likert

terbagi menjadi dua jenis utama diantaranya skala likert ganjil, dan skala likert genap. Skala likert ganjil digunakan untuk memberikan responden pilihan atau menanggapi secara netral. Sedangkan skala likert genap bertujuan agar respon diterima tidak terdapat pilihan netral. Penelitian ini menggunakan skala likert genap.

Selanjutnya, untuk melakukan analisis skala likert terdapat tahapan yang perlu disiapkan sebelum melakukan analisis.

Tahapan-tahapan yang dimaksud antara lain:

1) Pengumpulan Dataset

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai persepsi mereka terhadap suatu fenomena. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 2 jenis pertanyaan yakni pertanyaan mengenai kepuasan fasilitas dan pertanyaan mengenai kepuasan infrastruktur yang ada di desa. Terdapat 8 pertanyaan dengan 5 kategori yang disediakan, dan responden hanya perlu memberikan tanda centang pada kuesioner tersebut.

2) Tahap *Preprocessing*

Tahap *Processing* bertujuan untuk mengolah data dalam bentuk kuesioner menjadi data kuantitatif sehingga dapat dilakukan proses analisis.

3) Tahap analisis menggunakan skala likert

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert genap yakni skala 1-4 pilihan dengan gradasi dari Sangat Tidak Puas (STP) hingga Sangat Puas (SP). Setiap tingkatan memiliki bobot nilai masing-masing yakni:

- Sangat Tidak Puas: STP = Nilai 1
- Tidak Puas: TP = Nilai 2
- Puas: P = Nilai 3
- Sangat Puas: SP = Nilai 4

Setelah responden memilih jawaban mengenai suatu pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti, selanjutnya hasil jawaban tersebut akan dilakukan perhitungan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mentotalkan jawaban kuesioner

- b. Menghitung Total Maksimal dan Total Minimal, menggunakan rumus:

$$Total\ Maksimal$$

$$= Skor\ maksimal\ skala\ likert$$

$$* Total\ pertanyaan$$

$$Total\ Minimal = Skor\ minimal\ skala\ likert$$

$$* Total\ pertanyaan$$

- c. Setelah mendapatkan nilai dari total maks dan total min, selanjutnya ialah menentukan rentang (*range*) dengan perhitungan:

$$Range = Total\ maks - Total\ min$$

- d. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai panjang kelas interval (*p*). Untuk menghitung nilai interval dilakukan perhitungan:

$$Range$$

$$p = \frac{Skor\ maksimal\ skala\ likert}{}$$

- e. Sebelum melakukan interpretasi, perlu dilakukan pengkategorian terlebih dahulu untuk melihat hasil dari pernyataan responden dalam memilih jawaban. Perhitungan untuk menentukan kategori dilakukan dengan cara:

$$Kategori$$

$$= Batas\ bawah$$

$$+ kelas\ interval\ (p)$$

Dalam penelitian terdapat 4 kelas dengan kategori sangat tidak puas, tidak puas, puas, dan sangat puas. Maka dengan panjang kelas interval (*p*) dan dengan dimulai batas bawah distribusi kelas, maka distribusi kelas skala likert yang diperoleh sebagai berikut

Tabel 2 Distribusi Kelas Skala Likert

Proses	<i>p</i>	Kategori
9.74+2.25 = 12	9.74-12	Sangat Puas
7.49+2.25 = 9.74	7.49-9.74	Puas
5.25+2.25 = 7.49	5.25-7.49	Tidak Puas
3 + 2.25 = 5.25	3-5.25	Sangat Tidak Puas

Sumber: Hasil kajian penelitian, 2024

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Pemekaran

Setelah dimekarkan, infrastruktur yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu terbilang cukup memadai. Hal ini terlihat dari jenis infrastruktur yang tersedia seperti jalan, irigasi, listrik, air bersih, dan komunikasi. Namun jika dilihat berdasarkan pembagian administrasi wilayah, tidak semua dusun memiliki ketersediaan infrastruktur dengan kondisi yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi pembangunan

infrastruktur apa saja yang ada di kedua desa pemekaran tersebut untuk mengetahui infrastruktur apa saja yang diperlukan. Adapun hasil identifikasi pembangunan infrastruktur yang diperoleh, sebagai berikut.

Tabel 3 Perubahan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Desa Lowolabo

No	Desa Lowolabo		
	Jenis Fasilitas	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
1	Jaringan Jalan	Terdapat 3 jenis jalan yakni jalan kolektor berspal dengan kondisi baik, jalan lokal berspal dengan kondisi baik dan jalan lingkungan berupa perkerasan tanah, yakni jalan.	Tidak adanya perubahan baik itu perbaikan kondisi jalan maupun akses jalan baru.
2	Jaringan Listrik	Sebagian besar masyarakat desa sudah terlayani listrik yakni sebanyak 257 KK dari jumlah total 282 KK.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan layanan listrik untuk KK yang belum terlayani.
3	Jaringan Telekomunikasi	Jaringan internet menggunakan 4G LTE Telkomed dan indosat yang terkadang kualitas sinyal yang dihasilkan lemah dan tidak merata.	Tidak adanya perubahan kualitas sinyal, serta akses internet yang masih belum merata.
4	Jaringan Sampah	Pengolahan sampah masih dilakukan dengan cara dibakar dan dibuang ke lahan kosong.	Tidak adanya perubahan berupa penyediaan pembuangan sampah sementara serta pengolahan sampah yang komprehensif.
5	Jaringan Limbah	Masyarakat menggunakan septictank yakni sebanyak 175 KK dengan skala pengolahan individual.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan septictank atau pengolahan limbah yang memadai.
6	Jaringan Air Bersih	Sumber air bersih masyarakat yakni air sumur yang digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci sedangkan untuk minum masyarakat mendapatkannya dari mata air yang jauh dari permukiman desa.	Tidak adanya perubahan berupa adanya jaringan perpipaan atau sumur bor yang memudahkan masyarakat mengakses air bersih.
7	Jaringan Drainase	Kondisi drainase terbangun cukup baik yang terdapat di sepanjang jalan raya maupun jalan lingkungan di permukiman warga.	Tidak adanya perubahan perbaikan kondisi drainase.
8	Jaringan Irigasi	Sistem irigasi memanfaatkan air dari sungai yang mengalir di desa yang kemudian di distribusikan ke sawah.	Tidak ada perubahan berupa penambahan irigasi teknis sehingga tidak semua sawah masyarakat memperoleh pengairan yang cukup.
9	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas sekolah terdiri dari 2 unit PAUD, 1 unit SD, dan 1 unit SMA.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah khususnya pendidikan PAUD.
10	Fasilitas Kesehatan	Terdapat 1 unit posyandu dan 1 unit Apotek.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang membantu akses pelayanan kesehatan lebih mudah.
11	Fasilitas Peribadatan	Tidak terdapat fasilitas peribadatan jenis apapun.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan tempat ibadat. Masyarakat desa biasanya beribadat di tempat ibadat terdekat dari rumahnya.
12	Fasilitas Perkantoran	Belum adanya bangunan kantor desa dan masih berupa tanah kosong.	Terdapat bangunan kantor desa dan dikelola oleh aparat desa yang merupakan masyarakat Desa Lowolabo.

Sumber: Hasil analisis data, 2024

Tabel 4 Perubahan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Desa Aebubu

No	Desa Aebubu		
	Jenis Fasilitas	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
1	Jaringan Jalan	Terdapat 3 jenis jalan yakni jalan kolektor berspal dengan kondisi baik, jalan lokal dengan perkerasan semen dan memiliki kondisi baik. Serta, jalan lingkungan dengan perkerasan tanah.	Tidak adanya perubahan baik itu perbaikan kondisi jalan maupun akses jalan baru.
2	Jaringan Listrik	Sumber pembangkit listrik berasal dari Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang kemudian dialirkan dari SUTM ke permukiman warga.	Tidak adanya perubahan yakni dengan penambahan cakupan layanan listrik untuk beberapa permukiman warga.
3	Jaringan Telekomunikasi	Jaringan internet menggunakan provider Telkomed dan indosat dengan kondisi yang cukup memadai namun sinyal yang dihasilkan lemah.	Tidak adanya perubahan kualitas sinyal, serta akses internet yang masih belum merata.
4	Jaringan Sampah	Pengolahan sampah masih dilakukan dengan cara dibakar dan dibuang ke dekat aliran sungai.	Tidak adanya perubahan berupa penyediaan tempat pembuangan sampah sementara maupun pengolahan sampah yang komprehensif.
5	Jaringan Limbah	Masyarakat menggunakan septictank individual yang dimiliki oleh masyarakat desa.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan septictank atau pengolahan limbah yang memadai.
6	Jaringan Air Bersih	Sumber air bersih masyarakat yakni sumur jalan dan sumber mata air yang ada dekat aliran sungai. Selain itu, terdapat juga bak penampungan yang kemudian dialirkan ke permukiman warga.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan jaringan perpipaan yang memadai sehingga masyarakat masih untuk mendapatkan air bersih.
7	Jaringan Drainase	Kondisi drainase yang ada di desa cukup memadai dengan kondisi baik.	Tidak adanya perubahan berupa perbaikan kondisi drainase.

No	Desa Aebubu		
	Jenis Fasilitas	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
8	Jaringan Irigasi	Sistem irigasi menggunakan irigasi teknis dan irigasi non teknis dengan kondisi baik.	Tidak ada perubahan berupa penambahan irigasi teknis akan pengairan sawah dapat memadai.
9	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas sekolah terdiri dari 2 unit PAUD, 1 unit SD, dan 1 unit SLTA.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah khususnya pendidikan PAUD.
10	Fasilitas Kesehatan	Terdapat 1 unit posyandu yang menjadi satu bangunan dengan PAUD.	Tidak adanya perubahan berupa penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan lebih baik.
11	Fasilitas Peribadatan	Terdapat fasilitas peribadatan yang terdiri dari 2 unit Gereja, dan 1 unit Bara Susteran.	Tidak adanya perubahan berupa perbaikan kondisi fasad bangunan peribadatan maupun penambahan jumlah fasilitas peribadatan.
12	Fasilitas Perkantoran	Belum adanya bangunan kantor desa dan masih berupa tanah kosong.	Terdapat bangunan kantor desa dan dikelola oleh aparat desa yang merupakan masyarakat Desa Aebubu.

Sumber: Hasil analisis data, 2024

Berdasarkan hasil identifikasi pembangunan infrastruktur yang ada di kedua desa pemekaran, dari 12 jenis infrastruktur perubahan yang terjadi hanya terdapat pada fasilitas perkantoran yakni adanya bangunan kantor desa yang dikelola oleh aparat desa yang merupakan masyarakat desa itu sendiri. Adapun gambar kantor desa, dapat dilihat, sebagai berikut.



Gambar 1 Kantor Desa Lowolabo

Sumber: Hasil survey primer, 2024



Gambar 2 Kantor Desa Aebubu

Sumber: Hasil survey primer, 2024

Analisis Skala Likert Tingkat Kepuasan Masyarakat

a. Analisis Skala Likert Desa Lowolabo

Terdapat 75 responden yang bersedia mengisi kuesioner terkait pertanyaan

mengenai kepuasan terhadap infrastruktur di desa. Responden yang dituju ialah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lowolabo dengan 3 dusun berbeda yakni Dusun Rumbi, Dusun Lowolabo, dan Dusun Pakandeku. Adapun hasil yang didapatkan, sebagai berikut.

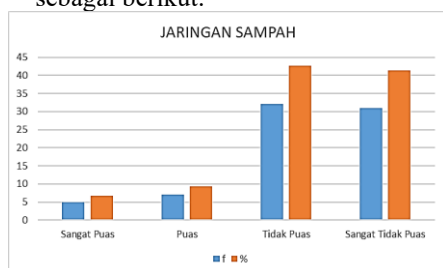
Tabel 5 Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Lowolabo

No	Jenis Infrastruktur	Lowolabo			
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1	Jaringan Jalan	18.7%	49.3%	21.3%	10.7%
2	Jaringan Listrik	4.0%	10.7%	58.7%	26.7%
3	Jaringan Telekomunikasi	12.0%	9.3%	58.7%	20.0%
4	Jaringan Sampah	41.3%	42.7%	9.3%	6.7%
5	Jaringan Limbah	36.0%	28.0%	28.0%	8.0%
6	Jaringan Air Bersih	10.7%	12.0%	66.7%	10.7%
7	Jaringan Drainase	26.7%	50.7%	20.0%	2.7%
8	Jaringan Irigasi	10.7%	65.3%	18.7%	5.3%
9	Fasilitas Pendidikan	16.0%	2.7%	61.3%	20.0%
10	Fasilitas Kesehatan	9.3%	5.3%	68.0%	17.3%
11	Fasilitas Peribadatan	8.0%	8.0%	73.3%	10.7%
12	Fasilitas Perkantoran	16.0%	5.3%	73.3%	5.3%

Sumber : Hasil analisis data, 2024

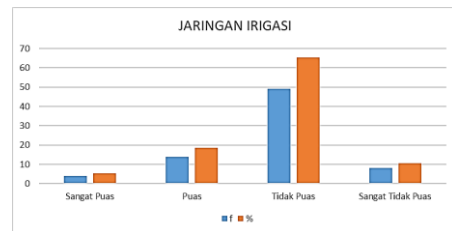
Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil presentase responden yang menjawab, sebagai berikut.

- Pada pilihan dengan kategori Sangat Tidak Puas (STP), presentase tertinggi terdapat pada infrastruktur jaringan sampah dengan nilai presentase yakni sebesar 41.3%. Sedangkan untuk pilihan Tidak Puas (TP) terdapat pada infrastruktur jaringan irigasi dengan nilai presentase sebesar 65.3%. Adapun gambar grafik kepuasan infrastruktur dengan kategori Sangat Tidak Puas (STP) dan Tidak Puas (TP), yakni sebagai berikut.



Gambar 3 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Sampah di Desa Lowolabo

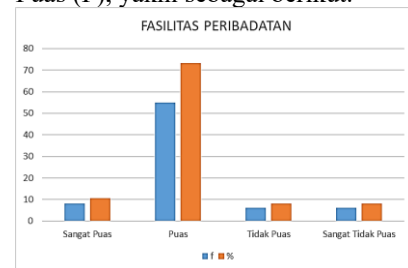
Sumber : Hasil analisis data, 2024



Gambar 4 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Desa Lowolabo

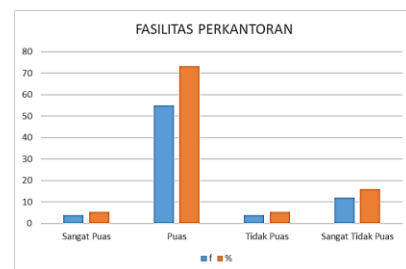
Sumber : Hasil analisis data, 2024

- Kemudian, untuk pilihan dengan kategori Puas (P), presentase tertinggi terdapat pada fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran dengan nilai presentase yakni sebesar 73.3%. Dan untuk pilihan Sangat Puas (SP) terdapat pada infrastruktur jaringan listrik dengan nilai presentase sebesar 26.7%. Adapun gambar grafik kepuasan infrastruktur dengan kategori Puas (P) dan Sangat Puas (P), yakni sebagai berikut.



Gambar 5 Grafik Kepuasan Infrastruktur Peribadatan di Desa Lowolabo

Sumber: Hasil analisis data, 2024



Gambar 6 Grafik Kepuasan Fasilitas Perkantoran di Desa Lowolabo

Sumber: Hasil analisis data, 2024

b. Analisis Skala Likert Desa Aebubu

Kepada 79 responden yakni masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Aebubu yang terbagi menjadi 3 dusun yakni Dusun Niobewa, Dusun Arewawo, dan Dusun Aebubu. Dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan mengenai tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Adapun hasil analisis skala likert yang didapatkan, sebagai berikut.

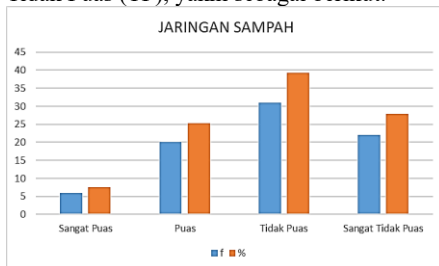
Tabel 6 Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pembangun Infrastruktur di Desa Aebubu

No	Jenis Infrastruktur	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1	Jaringan Jalan	6.3%	31.7%	50.6%	11.4%
2	Jaringan Listrik	19.0%	16.5%	51.9%	8.9%
3	Jaringan Telekomunikasi	12.7%	24.1%	53.2%	10.1%
4	Jaringan Sampah	27.8%	39.2%	25.3%	7.6%
5	Jaringan Limbah	21.5%	35.4%	32.9%	10.1%
6	Jaringan Air Bersih	21.5%	7.6%	45.6%	25.3%
7	Jaringan Drainase	16.5%	41.8%	30.4%	11.4%
8	Jaringan Irigasi	16.0%	20.3%	32.9%	31.7%
9	Fasilitas Pendidikan	15.2%	19.0%	51.9%	13.9%
10	Fasilitas Kesehatan	10.1%	27.9%	39.2%	22.8%
11	Fasilitas Peribadatan	7.6%	30.4%	51.9%	10.1%
12	Fasilitas Perkantoran	13.9%	24.1%	43.0%	19.0%

Sumber: Hasil analisis data, 2024

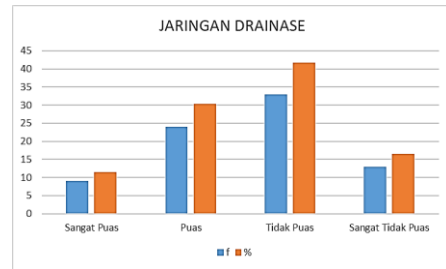
Berdasarkan tabel diatas presentase tingkat kepuasan infrastruktur diatas diketahui hasil presentase responden yang menjawab, yakni sebagai berikut.

- Pada pilihan dengan kategori Sangat Tidak Puas (STP), presentase tertinggi terdapat pada infrastruktur jaringan sampah dengan nilai presentase yakni sebesar 27.9%. Sedangkan untuk pilihan Tidak Puas (TP) terdapat pada infrastruktur jaringan drainase dengan nilai presentase sebesar 41.8%. Adapun gambar grafik kepuasan infrastruktur dengan kategori Sangat Tidak Puas (STP) dan Tidak Puas (TP), yakni sebagai berikut.



Gambar 7 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Sampah di Desa Aebubu

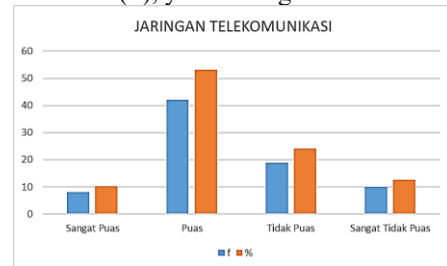
Sumber: Hasil analisis data, 2024



Gambar 8 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Drainase di Desa Aebubu

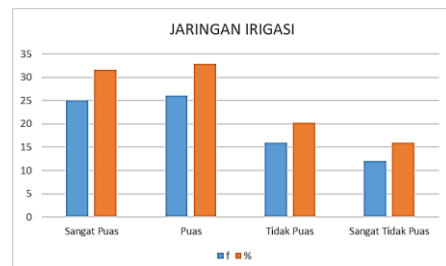
Sumber: Hasil analisis data, 2024

- Kemudian, untuk pilihan dengan kategori Puas (P), presentase tertinggi terdapat pada jaringan telekomunikasi dengan nilai presentase yakni sebesar 53.1%. Dan untuk pilihan Sangat Puas (SP) terdapat pada infrastruktur jaringan irigasi dengan nilai presentase sebesar 31.7%. Adapun gambar grafik kepuasan infrastruktur dengan kategori Puas (P) dan Sangat Puas (P), yakni sebagai berikut.



Gambar 9 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Desa Aebubu

Sumber: Hasil analisis data, 2024



Gambar 10 Grafik Kepuasan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Desa Aebubu

Sumber: Hasil analisis data, 2024

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan hasil identifikasi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, perubahan sebelum dan sesudah pemekaran yang terjadi pada kedua desa terdapat pada Fasilitas Perkantoran yakni terdapat bangunan kantor desa. Adanya kantor desa ini berdampak pada jangkauan pelayanan publik yang dekat sehingga mempermudah dalam mengurus keperluan di desa. Selain itu, kantor desa ini juga dikelola oleh aparat desa yang merupakan masyarakat desa itu sendiri sehingga membantu dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.
- 2) Berdasarkan hasil analisis tingkat kepuasan masyarakat menggunakan skala likert, didapatkan hasil presentase kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang ada di kedua desa. Pada Desa Lowolabo, masyarakat merasa puas dengan fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran. Hal ini menunjukkan, pembangunan infrastruktur tersebut sesuai harapan masyarakat dan berjalan dengan baik. Sebaliknya, masyarakat kurang puas dengan infrastruktur jaringan sampah dan jaringan irigasi. Hal ini berarti, perlu adanya pengadaan dan peningkatan kualitas pada infrastruktur tersebut. Pada Desa Aebubu, masyarakat merasa puas dengan jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi yang ada di desa. Sedangkan untuk jaringan sampah dan drainase masyarakat Desa Aebubu merasa kurang puas sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pada infrastruktur tersebut.
- 3) Berdasarkan hasil evaluasi pemekaran desa yang ada di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, diketahui bahwa hasil identifikasi pembangunan infrastruktur yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran yang ada pada kedua desa terdapat pada fasilitas perkantoran yakni dengan adanya bangunan kantor desa. Sedangkan, hasil analisis tingkat

kepuasan masyarakat menunjukkan kepuasan pada fasilitas peribadatan, perkantoran, jaringan telekomunikasi, dan jaringan irigasi. Hal ini berarti, tingkat kepuasan masyarakat tidak dipengaruhi oleh kondisi pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas pada Bab 4 dan kesimpulan yang telah dijabarkan pada sub bab 5.1, maka penulis dapat memberikan rekomendasi berupa rekomendasi teoritis dan rekomendasi teknik. Adapun rekomendasi yang dimaksud dapat dijabarkan, sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi Teoritis, berdasarkan hasil penelitian Peneliti merekomendasikan kepada penulis yang ingin melakukan penelitian serupa untuk lebih mengkaji lagi kondisi pembangunan infrastruktur sebelum dan sesudah adanya pemekaran desa sehingga bisa mengetahui apakah pemekaran tersebut berdampak positif atau negatif. Selain itu, dalam melakukan analisis tingkat kepuasan masyarakat, peneliti juga perlu mengkategorikan tingkat kepuasan berdasarkan data kependudukan sehingga data yang ditampilkan lebih bervariasi.
- 2) Rekomendasi Teknis, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, kondisi infrastruktur yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Maka penulis merekomendasikan kepada pemerintah desa, agar kedepannya dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur di desa, perlu mengetahui terlebih dahulu infrastruktur apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Sehingga ketika dilakukannya pembangunan mampu dirasakan oleh semua masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat. *Sosiohumaniora*, 21(1), 58. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363>
- Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik - Studi

- Kasus Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. (2017).
- Florespedia. (2022). *34 Desa Persiapan di Kabupaten Sikka Sah Jadi Desa Definitif*. <https://M.Kumparan.Com.m.kumparan.com/florespedia/34-desa-persiapan-di-kabupaten-sikka-sah-jadi-desa-definitif-1yw57LI3gGo>
- Hakim, A., Hamidi, W., & Tampubolon, D. (2016). Analisis dampak pemekaran daerah ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi dan Peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 843–857.
- Jati, R. retno. (2016). Kajian Yuridis Pembentukan Dan Pemekaran Desa Di Kabupaten Minahasa. *Lex et Societatis*, 66(8), 37–39.
- Kantun, S. (2017). Penelitian Evaluatif Sebagai Satu Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Rumambi, F. J. (2022). Apakah kepuasan pelanggan Shopee bergantung pada voucher diskon dan gratis ongkir? *Jurnal Manajemen & Bisnis Asmi*, 08(2), 88–100. <http://journal.ibmasmi.ac.id/index.php/JMBA/article/view/501>
- Santika, A. A., Saragih, T. H., & Muliadi, M. (2023). Penerapan Skala Likert pada Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Agen Brilink Menggunakan Random Forest. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 11(3), 405. <https://doi.org/10.26418/justin.v11i3.62086>
- Subagyo, A. (2013). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. ... -*Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30669%0Ahttps://repository.unikom.ac.id/30669/1/agus-subagyo.pdf>
- Sundari, W., Badrizal, S.Sos, M. S., & Fadlan Kalma, S.ThI, M. . (2020). Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tampak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 2(10), 81–90.
- Syahrir, M. S., Yakub, A., & Ariana, A. (2022). Upaya Masyarakat Walmas Dalam Mengawal Proses Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 67–80. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2767>
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–8.